

HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM Mendukung PELAKSANAAN Hak Pengusahaan Hutan Dengan PT. SARI BUMI KUSUMA DI MERAKO Kecamatan SERAWAI KABUPATEN SINTANG

*Public Relations to Supporting The Implementation of Forest Enterprises
Authorization With Pt. Sari Bumi Kusuma In Merako
Serawai District Sintang Regency*

Ginidie¹, Bakran Suni², Dedi Kusnadi³

*Program Studi Administrasi Negara
Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak*

ABSTRAK

Konflik dalam bidang kehutanan yang berkaitan dengan kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) terjadi di beberapa kawasan Kalimantan Barat. Demikian pula di Kabupaten Sintang khususnya di Merako Kecamatan Serawai, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang hak pengusahaan hutan dikelola oleh PT Sari Bumi Kusuma. Menjadi fokus kajian ini yaitu peran hubungan masyarakat sebagai faktor penting dalam meminimalisir konflik antara PT Sari Bumi Kusuma dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, ruang lingkup masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan hubungan masyarakat dalam mendukung hak pengusahaan hutan oleh PT. Sari Bumi Kusuma. Strategi hubungan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan HPH oleh PT. Sari Bumi Kusuma dilakukan melalui hubungan dengan publik internal karyawan dan pemegang saham maupun hubungan dengan publik eksternal masyarakat sekitar masih menghadapi masalah terutama berkaitan dengan aktivitas mata pencaharian, penduduk penerimaan pegawai dan sistem perladangan.

Kata Kunci: Hubungan Masyarakat, Hak Pengusahaan Hutan

ABSTRACT

Conflicts in forestry in relation with the policy of Forest Concession occur in areas of West Kalimantan. One of which is in Sintang, especially in Merako, Serawai District a company runs business in forest concession owned by PT. Sari Bumi Kusuma. The aim of this research is to investigate role of local people relationship reducing conflicts between PT Sari Bumi Kusuma and the local people. The strategy of local people relationship in supporting the policy of forest forest concession by PT Sari Bumi Kusuma is good to practice among internal staff, shareholders, and local people living nearby the location. The relationship between staff is good but not with local people; this is related to local people income, staff recruitment, and farming system.

Key words: Social relationship, Forest Concession

¹ Anggota DPRD Kab. Sintang

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi dan sumberdaya hutan sebagai sumber devisa atau modal dalam membangun, maka apapun yang berasal dari hutan tidak hanya kayu namun juga hasil hutan ikutan lainnya seperti satwa, rotan, damar, gaharu, tengkawang dan lain sebagainya selalu dipandang sebagai komoditas ekonomi. Sebagai salah satu implikasi dari paradigma pembangunan tersebut, di seluruh pelosok pedalaman Kalimantan Barat banyak bermunculan berbagai perusahaan penebangan kayu (Hak Pengusahaan Hutan/HPH) dan penebangan kayu secara ilegal yang hanya mengambil kayunya saja, sehingga kehabisan areal hutan yang layak lagi untuk ditebangi. Pemanfaatan sumberdaya alam hutan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, budaya maupun ekologi lingkungannya dapat menciptakan beban resiko tinggi yang harus ditanggung oleh sumberdaya alam itu sendiri terutama sekali bagi masyarakat di sekitarnya tanpa ikut menikmati langsung hasilnya.

Oleh karena itu, penetapan suatu areal hutan secara proporsional misalnya sebagai hutan produksi, kawasan hutan lindung maupun kawasan konservasi, tentunya merupakan upaya bijaksana untuk mempertahankan keberadaan hutan dan fungsi hutan dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, pertahanan keamanan serta aspek-aspek teknis lainnya. Menurut Pamulardi (1999:283-284) “bahwa untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi masyarakat Indonesia dan pertimbangan-pertimbangan fisik, iklim dan pengaturan tata air, maka luas minimum lahan yang harus dipelihara dan dipertahankan sebagai kawasan hutan diperkirakan sekitar 30% dari luas daratan”.

Masyarakat di pedalaman Kalimantan Barat, dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehari-hari mereka sangat bergantung kepada hutan yang ada di sekitarnya. Menurut Alqadrie (2002:27-28) “bahwa hutan bagi masyarakat pedalaman merupakan “dunia” atau kehidupan mereka, sehingga tumbuh komitmen untuk menjaga kelestariannya demi keberadaan dan kelanjutan hidup hutan itu sendiri, kehidupan mereka dan hubungannya dengan alam dan Tuhan mereka”.

Sejalan dengan paradigma baru dalam memandang sumberdaya alam hutan berbasis masyarakat (*community based forest management*), maka di dalam pengelolaan seharusnya tidak terlepas dari upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui nilai kearifan budaya lokal tradisional dalam wujud perilaku yang ada di masyarakat, dengan perspektif hutan sebagai satu kesatuan dengan kehidupan masyarakatnya. Pola pembangunan juga sangat berpengaruh terhadap konsistensi perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan usaha pemanfaatan serta upaya melestarikan sumberdaya alam guna menunjang pengelolaan sumberdaya alam hutan yang berkelanjutan (*sustainability forest management*). Angi (2001:22-23) berpendapat bahwa “kelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya alam menjadikan kita menyadari untuk selalu berbuat yang terbaik bagi pengelolannya, yang bersumber dari pengalaman pengetahuan masyarakat (*traditional knowledge*) sebagai pengetahuan dan kearifan lokal tradisional yang spesifik dari fungsi interaksi dan ketergantungan tersebut”.

Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang dilaksanakan oleh PT Sari Bumi Kusuma meliputi kegiatan utama yakni Kegiatan Penggunaan Lahan. Kegiatan Penggunaan Lahan (*Land-Use*) itu sendiri mencakup dua proses kegiatan yang saling terkait yaitu Kegiatan Perolehan Lahan (*Land Acquisition*) dan Kegiatan Pengembangan Masyarakat (*Community Development*). Kegiatan Pengembangan Masyarakat tersebut dalam penerapannya dilaksanakan dalam suatu kerangka kegiatan Pembinaan Masyarakat yang dikenal pula dengan istilah Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH).

Kedua kegiatan tersebut disadari tidak mungkin dapat berjalan sendiri, melainkan harus berjalan secara terpadu dan seimbang. Perusahaan tidak dapat membangun Tanaman dengan mengabaikan aspek Pembinaan Masyarakat, karena

bagaimanapun juga Masyarakat merupakan bagian dari Pembangunan Sektor Kehutanan secara keseluruhan yang secara langsung dan tidak langsung memberikan andil di dalamnya.

Penyebab konflik umumnya terjadi karena faktor ekonomi, hukum dan sosial budaya. Kasus yang cukup menonjol di bidang kehutanan adalah : konflik tata batas wilayah/areal hutan (hutan adat), penggusuran simbol-simbol budaya masyarakat, ganti rugi lahan, dan kesempatan kerja di perusahaan, serta pembinaan masyarakat desa hutan oleh perusahaan HPH serta persoalan DR/PSDH antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi/Pusat.

Guna meminimalisir konflik, dibutuhkan strategi kerjasama yang baik antara masyarakat yang menguasai lahan dengan perusahaan yang memanfaatkan lahan tersebut. Konsep kerjasama tersebut adalah mengembangkan model kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan dimana kedua pihak baik masyarakat maupun perusahaan bersamasama saling mendukung dan mendapatkan keuntungan serta diharapkan akan terwujud Hutan yang Lestari dan Masyarakat yang Mandiri (Sejahtera). Baik hubungan eksternal maupun hubungan internal, hubungan interaksi penduduk lokal dan karyawan, pendatang. Hubungan pekerjaan serta pendapat penduduk lokal tentang upacara adat, lingkungan maupun hubungan manusia dan alam. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyelenggaraan hubungan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Oleh PT Sari Bumi Kusuma di Merako Jaya Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.

METODOLOGI PENELITIAN

Memperhatikan latar belakang yang telah diungkapkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah pelaksanaan hubungan interaksi masyarakat lokal dalam mendukung Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan PT Sari Bumi Kusuma di Merako Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang?”. Dalam penelitian ini rancangan yang dipergunakan adalah rancangan penelitian deskriptif. Alasan menggunakan rancangan penelitian deskriptif dalam penelitian ini dianggap sesuai dalam menjelaskan masalah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan hubungan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Oleh PT Sari Bumi Kusuma di Merako Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.

Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hubungan interaksi masyarakat lokal dengan karyawan, pendatang, upacara adat serta hubungan manusia dengan alam serta dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Oleh PT Sari Bumi Kusuma. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan hubungan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Oleh PT Sari Bumi Kusuma di Merako Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis dapat menambah khasanah dan wawasan Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik serta *public relation* dan *human relation*. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran terhadap program pembangunan HPH khususnya di Kabupaten Sintang, terutama dalam mengimplementasikan program pembangunan kehutanan, mencari jalan keluar dalam upaya pemecahan masalah baik yang dihadapi oleh masyarakat, perusahaan maupun pemerintah daerah sehingga diperoleh pola pembangunan HPH yang tepat, serta mendorong terciptanya iklim investasi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sumber daya hutan yang cukup besar. Menurut Alqadrie, (2002: 3) : Hutan di Indonesia pada umumnya dikenal sebagai Hutan Hujan Tropis/HHT (*Indonesian tropical rain forest*) dan emas hijau (*green gold*) sangat kaya dengan flora dan fauna maupun kehidupan lainnya yang mewah dan tidak ternilai harganya (*luxury forest*). Banyak peneliti, wisatawan dan pakar sektor kehutanan menyebut hutan ini sebagai mutumanikam atau zamrut yang melingkari garis Khatulistiwa.

Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan adalah kegiatan pengaturan tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu proses kebijakan publik adalah implementasi. Lazimnya Implementasi dipahami sebagai "suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program" (Jones, 1991: 296). Kegiatan untuk mengoperasikan ini berisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan. Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah jembatan yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (dalam Jones, 1991: 295) bahwa "implementasi/penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan".

Aktivitas implementasi kebijakan pada dasarnya bersifat kompleks karena sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Grindle (dalam Wibawa, 1992: 26) menyatakan : Ada dua hal yang mempengaruhi aktivitas implementasi dalam proses politik dan administrasi yaitu *contents of policy* dan *contexts of implementation*". Adapun dimaksud *contents of policy* yaitu kepentingan yang dipengaruhi (*interests affected*), tipe manfaat (*type of benefits*), derajat perubahan yang diharapkan (*extent of change envisioned*), letak pengambilan keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementator*) dan sumber daya yang dilibatkan (*resources committed*). Sedangkan yang dimaksud *contexts of implementation* yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*power, interest and strategies of actors*), karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristic*) dan kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiveness*).

Dalam menetapkan kebijakan pengelolaan hutan, sangat perlu dipahami tentang konsep pengelolaan hutan itu sendiri. Menurut Awang (2003 : 24) konsep pengelolaan hutan pada dasarnya memiliki dua (2) paradigma pokok, yaitu: Paradigma kehutanan negara (*state based*) dan paradigma kehutanan masyarakat (*community based*). Yang pertama pengelolaan hutan didominasi oleh negara sedangkan yang kedua lebih menempatkan posisi masyarakat, terutama masyarakat lokal sebagai aktor dominan dalam pengelolaan hutan. Masyarakat lokal dalam hal ini mampu membangun interaksi yang dinamis, baik hubungan eksternal maupun hubungan internal, interaksi penduduk lokal dengan karyawan perusahaan, para pendatang, kemudahan dalam mendapatkan

pekerjaan setelah adanya perusahaan, serta pendapat penduduk lokal tentang upacara adat, hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Karakteristik dari beberapa yang mengkerucut menjadi dua yaitu kehutanan negara dan kehutanan masyarakat, maka paradigma tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Karakteristik Paradigma Kehutanan Negara dan Kehutanan Masyarakat

No	Kehutanan negara	Kehutanan masyarakat
1.	A. Sikap dan Orientasi. Pengendalian.	Dukungan/fasilitas
2.	Penerima manfaat.	Mitra kerja
3.	Pengguna	Pengelola
4.	Pemb. Keputus. Unilateral	Partisipatif
5.	Orientasi penerimaan	Orientasi sumber daya
6.	Keuntungan nasional	Orientasi keadilan sosial
7.	Diarahkan oleh negara	Proses belajar/evolusi
8.	B. Institusional dan Administratif Sentralisasi	Desentralisasi
9.	Manajemen pemerintah	Kemitraan
10.	Tip down	Partisipatif/negosiasi
11.	Orientasi target	Orientasi proses
12.	Anggaran kaku	Anggaran fleksibel
13.	Aturan untuk menghukum	Penyelesaian konflik
14.	C. Metode Manajemen Kaku	Fleksibel
15.	Tujuan tunggal	Tujuan ganda
16.	Keseragaman	Keanekaragaman
17.	Produk tunggal	Produk beragam
18.	Aturan silvikultur tunggal	Silvikultur lokasi
19.	Tanaman	Spesifik lokal
20.	Tenaga kerja/buruh pengumpul	Manajer/pelaksana/pemroses/pemasar

Sumber: Awang, S. A. 2003 : 24

Dari tabel 1.1. di atas terlihat perbedaan yang tajam antara paradigma kehutanan negara dengan paradigma kehutanan masyarakat baik dilihat dari sikap dan orientasi, institusional dan administratif serta metode manajemen. Lahirnya perbedaan dua paradigma ini bukan hanya berasal dari asumsi-asumsi teknis yang melatarbelakanginya, tetapi juga berkaitan dengan pilihan aktor yang menjadi pengelola utama, yaitu antara negara atau masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan sering menimbulkan konflik sosial. Konflik adalah segala bentuk hubungan sosial yang berwujud perselisihan dan pertentangan baik bersifat non kekerasan maupun kekerasan. Bentuk konflik bisa konflik vertikal atau konflik horisontal. Munculnya konflik sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan didasari oleh argumen yang mengacu kepada perspektif politik, yaitu menguasai sumber daya alam (hutan) berarti menguasai sumber-

sumber ekonomi dan menguasai sumber-sumber ekonomi berarti memiliki alat/kendaraan untuk memperoleh kekuasaan. Sementara kekuasaan adalah konsep dan aktivitas yang selalu berkaitan dengan konflik. Menurut Awang (2003:17) selain itu, konflik sumber daya hutan diperparah oleh sebab kepemilikan, yaitu: "sumber daya hutan didominasi kepemilikannya oleh negara atau seolah-olah merupakan milik pemerintah sementara masyarakat dianggap sebagai pihak yang tidak mempunyai hak kepemilikan".

Dilihat dari jenisnya, "konflik sumber daya hutan dapat terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah dan antara masyarakat dengan pengusaha yang bergerak dalam perusahaan sumber daya hutan" (Awang, 2003: 24). Konflik antar masyarakat terjadi ketika perebutan akses hutan atau juga klaim kepemilikan hutan. Sedangkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha hutan digambarkan sebagai bentuk hubungan sosial yang tidak harmonis antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha hutan. Hubungan yang tidak harmonis tersebut diawali ketika pemerintah melakukan monopoli dan manipulasi proses eksploitasi sumber daya hutan sehingga terjadi perbedaan akses. Akses yang berbeda itu cenderung berpihak kepada pemerintah dan pengusaha hutan yang menikmati lebih banyak sementara kepentingan masyarakat terabaikan.

2. Hubungan Masyarakat

Ada beberapa pengertian mengenai Hubungan Masyarakat, yaitu antara lain sebagai berikut: Definisi humas menurut *British Institute of Public Relations* atau disingkat IPR (2004:9). yang terdapat dalam buku *Public Relations* karangan Jefkins yaitu: *Public Relations* (PR) adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (*good will*) dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya.

Definisi Hubungan Masyarakat (humas) menurut Anggoro yaitu: *Public Relations* (PR) adalah semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi atau perusahaan baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial dengan siapa saja yang berkepentingan dengan organisasi/perusahaan yang bersangkutan. (2000:1)

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi Humas antara lain sebagai berikut:

1. Humas berperan dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu perusahaan/organisasi dengan publik melalui proses komunikasi timbal balik yang efektif.
2. Humas merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan opini publik yang menguntungkan semua pihak, hal ini tercermin dalam sikap menyenangkan, itikad baik, saling pengertian dan saling menghargai.
3. Humas menentukan hidupnya perusahaan atau organisasi karena humas merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen guna mencapai tujuan suatu organisasi.

Ciri-ciri *Public Relations* menurut Ruslan (2003:103-104) adalah:

Informasi atau pesan yang disampaikan harus berdasarkan pada kebutuhan atau kepentingan khalayak sebagai sasarannya. *Public Relations* sebagai komunikator dan sekaligus mediator berupaya membentuk sikap, dan pendapat yang positif dari

masyarakat melalui rangsangan atau stimulasi. Mendorong publik untuk berperan serta dalam aktivitas perusahaan/organisasi, agar tercipta perubahan sikap dan penilaian (perubahan dari situasi negatif diubah menjadi situasi yang positif). Perubahan sikap dan penilaian dari pihak publik dapat terjadi maka pembinaan atau pengembangan terus-menerus dilakukan agar peran serta tersebut terpelihara dengan baik.

3. Hubungan Masyarakat Dalam Mendukung Kebijakan Pengelolaan Hutan

Faktor penting untuk untuk menghindari dan dalam rangka penyelesaian konflik sumber daya hutan, salah satunya ditentukan oleh faktor komunikasi antara perusahaan dengan khalayak atau publik di luar organisasi atau perusahaan. Menurut Effendi (1981:22) "pada instansi pemerintahan, lembaga, badan, perusahaan dan organisasi-organisasi lainnya yang besar, disebabkan luasnya ruang lingkup, maka komunikasi dengan khalayak atau publik di luar organisasi banyak dilakukan oleh Bidang Hubungan Kemasyarakatan". Menurut Efendi (1981:46-47) hubungan masyarakat dalam arti luas adalah:

Komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati kepada kedua belah pihak". Sedangkan hubungan masyarakat dalam arti sempit adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja (*work situation*) dan dalam organisasi keorganisasian (*work organization*) dengan tujuan untuk menggugah kegairahan dan kegiatan bekerja dengan semangat kerja yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati.

Dari dua pengertian tersebut, selanjutnya Efendi (1981:95) menyatakan bahwa hubungan masyarakat adalah sebagai berikut:

Hubungan masyarakat merupakan suatu kegiatan komunikasi yang khas yang mempunyai ciri-ciri dan meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) komunikasi yang dilakukan berlangsung dua arah secara timbal balik; (2) kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyebaran informasi, pelaksanaan persuasi dan pengkajian opini publik; (3) tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan organisasi itu sendiri; (4) sasaran yang dituju adalah publik di dalam dan publik di luar organisasi; serta (5) efek yang diharapkan adalah terjadinya hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik.

Memperhatikan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pada hubungan masyarakat komunikasi yang dilakukan berlangsung dua arah secara timbal balik; kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyebaran informasi, pelaksanaan persuasi dan pengkajian opini publik; tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan organisasi itu sendiri; sasaran yang dituju adalah publik di dalam dan publik di luar organisasi; serta efek yang diharapkan adalah terjadinya hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik. Dengan demikian menurut Efendi (1981:109) "pada hubungan melekat dua aspek yang hakiki yang tidak bias tidak ada yaitu: (1) sasaran hubungan masyarakat adalah publik internal dan publik eksternal; dan (2) kegiatan hubungan masyarakat adalah komunikasi dua arah timbal balik (*reciprocal two way traffic communication*)".

Menurut Efendi (1981:110) publik internal adalah "orang-orang yang berbeda atau tercakup dalam organisasi, seluruh pegawai mulai dari staf sampai karyawan bawahan (dalam perusahaan termasuk antara lain pemegang saham)". Berdasarkan pengelompokan itu, menurut Efendi (1981:142) maka terdapatlah hubungan yang khusus dengan mereka, yakni yang biasa disebut "Hubungan dengan Karyawan (*Employee Relations*) dan Hubungan dengan Pemegang Saham (*Stockholder Relations*)".

Dalam rangka melaksanakan hubungan dengan karyawan itu, petugas hubungan masyarakat perlu banyak melihat dan mendengarkan para karyawan. Kegiatan ini bisa menimbulkan banyak inisiatif pula. Mungkin petugas hubungan masyarakat muncul inisiatif mengadakan mushola, menyelenggarakan kantin, membentuk perkumpulan kesenian, mengadakan pertandingan olahraga dengan para wartawan dan sebagainya. Hanya dengan komunikasi antar persona dengan para karyawan, petugas hubungan masyarakat dapat menyelami perasaan mereka. Dan dengan komunikasi pula dapat dibina hubungan yang harmonis.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hubungan Masyarakat Dalam Mendukung Kebijakan Pengelolaan Hutan

Menurut Soemirat dan Ardianto (2002:90) “istilah strategi manajemen sering pula disebut rencana strategis perusahaan”. Suatu rencana strategis perusahaan menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan diambil dalam kurun waktu tertentu kedepan. Menurut Kasali (dalam Soemirat dan Ardianto 2002:90) ”rencana strategis perusahaan inilah yang menjadi pegangan bagi petugas hubungan masyarakat untuk menyusun berbagai rencana teknis dan langkah komunikasi yang akan diambil sehari-hari”. Untuk dapat bertindak secara strategis, kegiatan hubungan masyarakat harus menyatu dengan visi dan misi organisasi/perusahaannya. Grunig dan Repper (dalam Soemirat dan Ardianto 2002:93-94) mengemukakan model strategi manajemen dalam kegiatan hubungan masyarakat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap *stakeholders*. Sebuah organisasi/perusahaan mempunyai hubungan dengan publiknya bilamana perilaku organisasi tersebut mempunyai pengaruh terhadap *stakeholders*-nya atau sebaliknya. Petugas hubungan masyarakat harus melakukan survey untuk terus menerus membaca perkembangan lingkungan dan membaca perilaku organisasi serta menganalisis konsekuensi yang akan timbul.
2. Tahap publik. Publik terbentuk ketika organisasi/perusahaan menyadari adanya problem tertentu. Oleh karena itu, petugas hubungan masyarakat harus terus menerus mengidentifikasi publik yang muncul terhadap berbagai problem. Biasanya dilakukan melalui wawancara terhadap *focus group*.
3. Tahap isu. Yang dimaksud dengan isu disini bukanlah isu dalam arti kabar burung atau kabar tidak resmi yang berkonotasi negatif, melainkan suatu tema yang dipersoalkan.

Pada tahap selanjutnya, petugas hubungan masyarakat perlu mengembangkan objektif formal seperti komunikasi, akurasi, pemahaman, persetujuan dan perilaku tertentu terhadap program-programnya. Selain itu, petugas hubungan masyarakat harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya guna mengurangi konflik yang muncul dikemudian hari. Menurut Seitel (dalam Soemirat dan Ardianto 2002:100) “seperti halnya aktivitas organisasi lainnya, program hubungan masyarakat harus didukung dengan anggaran yang logis/memadai dan prinsip-prinsip pengawasan pengeluaran”. Selanjutnya menurut Soemirat dan Ardianto (2002:97) “kunci penganggaran dapat dilihat pada tahap ini adalah; (1) mengestimasi tingkat sumber daya manusia dan pembelian, dan (2) mengestimasi biaya pengeluaran dan tersedianya sumber daya”. Dari beberapa teori yang telah diungkapkan, bahwa terdapat teori penting dalam mendukung daripada akan lahirnya kerangka pemikiran yaitu pelaksanaan humas, pola humas dan faktor-faktor yang mempengaruhi daripada interaksi masyarakat atau dikenal dengan penduduk lokal dengan karyawan, pendatang serta kaitanya perusahaan dengan upacara adat serta menjaga hubungan kelestarian lingkungan alam. Perusahaan dan penduduk lokal dua bagian yang begitu penting dalam menumbuhkan perkembangan yang saling menguntungkan. Perusahaan sebagai penanam modal yang besar tentu tidak ingin uang mereka akan hilang begitu saja, akan harapan perusahaan tersebut

memperoleh keuntungan. Sementara penduduk lokal kawasan yang mereka tempati yang berlangsung lama, bahkan sudah turun temurun dengan hadirnya perusahaan, maka akan membuka peluang kerja, serta terjadi interaksi yang saling menguntungkan. Kawasan penduduk lokal yang sebelum sulit dijangkau melalui roda empat, sekarang sejak telah terbuka dan terbangunnya infrastruktur, maka akses keluar mengalami kemudahan serta terbuka dengan mendapat kemudahan.

HASIL ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat

1.1. Proses Humas

Berdasarkan hasil observasi di lingkungan masyarakat di Desa Merako, bahwa proses hubungan masyarakat sangat bervariasi, kondisi masyarakat dimana SDM yang rendah serta mereka hanya menerima apa adanya, maka masyarakatnya tidak mudah untuk menerima unsur luar yang belum tentu membawa kemajuan dan tingkat kesejahteraan lebih baik dari sebelumnya. Pihak perusahaan bekerjasama dengan tokoh adat yang selalu berupaya meyakinkan masyarakat agar member kemudahan bagi masuknya perusahaan menanamkan modalnya dalam penanaman kelapa sawit di lokasi yang telah dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun. Menurut Tokoh Adat Desa Merako Jaya, hasil wawancara tentang proses humas, Februari 2013 bahwa :

“proses hubungan masyarakat Merako Jaya dengan perusahaan mengalami pertemuan berkali-kali bagi meyakinkan masyarakat, bahwa perusahaan tersebut akan memberikan lapangan pekerjaan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka kawasan terisolir bagi kemajuan daerah. Membuka akses jalan bagi kemudahan masyarakat untuk mengeluarkan hasil karet dan hasil kebun yang boleh menghubungkan antar desa yang terdapat di Kecamatan Serawai yang selama ini terisolir antar kawasan”.

Sejalan dengan wawancara dengan Tokoh Adat Desa Merako Jaya, maka hasil dengan Kepala Desa Merako Jaya, melalui hasil wawancara, pada bulan Februari 2013 menyatakan bahwa :

“kegiatan proses hubungan masyarakat melalui kegiatan adanya Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) oleh perusahaan Sari Bumi Kusuma dilaksanakan setelah adanya kesepakatan antara Masyarakat setempat dengan Perusahaan. Semua kegiatan pembangunan sarana jalan, memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, keharmonisan sosial budaya dan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang sebelumnya terisolir antar hubungan desa menjadi lebih terbuka, setelah dibangunnya jalan dan member penyuluhan bagi mengenalkan peraturan serta kebijakan Pemerintah di Kabupaten bagi mengundang para investor untuk masuk ke kawasan desa yang dapat bekerjasama bagi pengembangan dan pembangunan perkebunan di tingkat kabupaten”.

Dalam upaya menjalin proses hubungan masyarakat dengan perusahaan di Desa Merako Jaya Kecamatan Serawai maka bagi perusahaan wajib untuk membangun tata ruang pembangunan lahan perkebunan bagi Pembangunan Hutan Tanam Industri (HTI)-Pulp Perusahaan tersebut agar dapat terpelihara hubungan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam memelihara hutan yang telah di tanam kembali bagi perbaikan lingkungan seperti pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tata Ruang Pembangunan Lahan PT Sari Bumi Kusuma

No	Keterangan	(%)	Luas
1.	Luas Netto Lahan Produksi Perusahaan	(70 %)	50.000 Ha
2.	Luas Areal Tanaman Unggulan	(10 %)	5.000 Ha
3.	Luas Areal Tanaman Kehidupan	(7,5 %)	3.750 Ha
4.	Luas Areal Konservasi	(10 %)	5.000 Ha
5.	Luas Areal bagi Sarana & Prasarana	(5 %)	2.500 Ha
TOTAL			66.250 Ha

Sumber: Dokumen PT Sari Bumi Kusuma (SBK), 2012.

Pada tabel 3.1. di atas, bahwa luas netto lahan produksi perusahaan adalah 50.000 ha atau 70% dari luas seluruh lahan yang mendapat izin dari pemerintah daerah dan pusat. Luas areal tanaman unggulan adalah 3.750 ha atau sama dengan 7,5%, luas areal konservasi yaitu 5.000 ha atau sama dengan 10% dari luas areal lahan, kemudian luas areal bagi sarana dan prasarana yaitu 2.500 ha atau sama dengan 5% dari luas seluruh areal lahan yang mendapat izin. Selanjutnya, menurut Camat Serawai, bagi menjalin proses hubungan masyarakat dengan perusahaan pengguna lahan dibuat secara langsung antara masyarakat setempat dengan perusahaan dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kecamatan dan Kabupaten dalam hal ini pihak Pemerintahan Kecamatan (Sumber: Hasil Wawancara, Februari 2013). Menyatakan sebagai berikut:

“semua kesepakatan penggunaan lahan antara masyarakat Desa Merako Jaya dan perusahaan pelaksanaannya disesuaikan dengan rencana yang dituangkan dalam rencana karya pengusahaan hutan yang telah disetujui dengan pihak pemerintah, dasar persetujuan pemerintah daerah itulah sebagai dasar bagi perusahaan untuk melaksanakan bagi melakukan proses humas di dalam masyarakat, agar terjalin hubungan yang lebih baik”.

Dari penjelasan Camat Serawai tersebut di atas bahwa dukungan dari Muspida/Muspika (TP3HTI-DII) kepada masyarakat setempat sangat dibutuhkan, dan dalam pelaksanaannya diperoleh melalui (1) Keikutsertaannya di dalam pendekatan langsung yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat setempat, (2) Melibatkan pemuka masyarakat Dusun setempat, dan (3) Keikutsertaan pimpinan Pemerintahan dan pemuka masyarakat Dusun setempat akan membantu dan penyelesaian permasalahan terutama yang menyangkut status lahan, batas areal atau hak kepemilikan lahan masyarakat. Perusahaan mengharapkan adanya kerjasama antar Dusun yang bertetangga dalam penyertaan lahan untuk memberikan kesempatan kerja sebanyak mungkin kepada masyarakat di dalam lokasi pembangunan. Perusahaan akan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat untuk melaksanakan negoisasi dan kesepakatan penggunaan lahan.

1.2. Prinsip-Prinsip Humas

Dalam kaitan prinsip-prinsip humas yang terdapat di perusahaan PT Sari Bumi Kusuma melakukan langkah-langkah bagi penjelasan bagi-bagi keuntungan bagi masyarakat yang telah memberikan lahan bagi perluasan perusahaan. Pihak Manager Distrik PT Sari Bumi Kusuma menyatakan prinsip-prinsip humas menjelaskan kepada warga masyarakat berupa:

“keuntungan jangka pendek, berupa: (1) pemberian insentif lahan terhadap setiap hektar luasan bersih yang diserahkan oleh masyarakat, (2) pemberian insentif infrastruktur terhadap setiap hektar luasan bersih yang diserahkan oleh masyarakat, (3) pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat dengan upah berdasarkan Peraturan Pemerintah (upah minimum regional) yang berlaku, serta (4) kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*) dengan tujuan menciptakan masyarakat yang mandiri melalui penguatan kelembagaan di dalam masyarakat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB)”.

Sedangkan Keuntungan Jangka Menengah, juga merupakan hasil wawancara (Maret 2013) dengan Manager Distrik perusahaan adalah sebagai berikut:

“bantuan tanaman kehidupan sebesar 7,5 % dari luasan areal yang terbuka disetiap Dusun/Kampung, bantuan usaha pertanian menetap (UPM) antara lain berupa pembuatan demplot intensifikasi pertanian lahan kering (*Agroforestry/Tumpangsari*), seluas 5 ha per Dusun/Kampung dan Intensifikasi pertanian lahan basah (sawah) seluas 2 ha per Dusun/Kampung serta kegiatan pembinaan masyarakat lainnya dilakukan secara berkelanjutan”.

Demikian pula hasil wawancara dengan Manager Distrik Perusahaan (wawancara Maret 2013) bagi proses humas adalah sebagai berikut:

“pihak perusahaan selalu melakukan sosialisasi bagi masyarakat terutama berkaitan dengan berbagai bidang yang diperlukan, mulai dari adanya kesepakatan penggunaan lahan perkebunan, pembinaan lingkungan, pemberian bantuan rumah ibadah, bantuan lapangan olah raga sampai kepada penentuan batas lahan yang telah dikeluarkan izin oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.”

Penggunaan lahan dari wawancara tersebut di atas, maka tentu sejalan juga observasi peneliti di lapangan bahwa dilakukan setelah adanya kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk dokumen kesepakatan penggunaan lahan. Kesepakatan tersebut dibuat antara masyarakat setempat secara kelompok dengan perusahaan. Areal yang digunakan adalah areal lahan tidak produktif terutama berupa vegetasi alang-alang, semak belukar, hutan rawang, yang arealnya kompak (satu lokasi) dan/atau areal yang masyarakat setuju untuk diusahakan/dikelola oleh perusahaan. Pada areal dengan topografi curam/terjal, rawa, payak, kebun masyarakat, hutan primer, hutan sekunder, hutan tutupan, dan tembawang, serta areal kuburan tidak akan digunakan.

1.3 Strategi Humas

Dalam upaya untuk menumbuhkan kerjasama dan penerimaan masyarakat di Desa Merako Jaya di Kecamatan Merawai, maka pihak humas memiliki strategi yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian seluruh kegiatan pengembangan masyarakat, berkonsentrasi pada manusianya dan menuju pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan pengembangan Sumber Daya Manusia akan mampu berprakarsa, dan berkreasi mengenai masalahnya sendiri, dan mengerahkan segala kemampuannya, dapat memecahkan masalahnya sendiri, sehingga melalui strategi humas tersebut masyarakat menjadi pelaku pembangunan. Dalam hal ini masyarakat berperan aktif dan sadar dalam pelaksanaan pembangunan hutan tanaman industri yang dikembangkan oleh perusahaan PT Sari Bumi Kusuma di Desa Merako Jaya Kecamatan Meraka Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagai langkah awal dan prasyarat utama sebelum memulai pelaksanaan pengembangan masyarakat oleh perusahaan PT Sari Bumi Kusuma adalah adanya kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan PT Sari Bumi Kusuma dalam kerjasama untuk membangun hutan tanaman industri yang dimuat dalam perjanjian penggunaan lahan, isi dari kesepakatan tersebut antara lain adalah kewajiban

perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat dalam konsep pengembangan masyarakat. Dengan demikian implementasi dari isi kesepakatan penggunaan lahan yang dibuat antara perusahaan dengan masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat tersebut itu sendiri sebagai isu penting bagi strategi perusahaan. Pada bagian tujuan daripada humas sebagaimana yang telah dikaji melalui penelitian ini, maka tugas humas adalah pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat di perusahaan tersebut, bagi membangun masyarakat melalui pemberdayaan dengan melakukan pembinaan melalui program yang terpadu dengan kegiatan pembangunan hutan tanaman industri, dan diharapkan kegiatan pembangunan tanaman dapat berhasil dan menjamin ketersediaan bahan baku secara berkesinambungan dan masyarakat dapat berkembang dan mampu membangun dirinya sendiri dengan potensi yang dimiliki yaitu Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.

1.4. Tugas Humas

Pada bagian tujuan daripada humas sebagaimana yang telah dikaji melalui penelitian ini, maka tugas humas adalah pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat di perusahaan tersebut, bagi membangun masyarakat melalui pemberdayaan dengan melakukan pembinaan melalui program yang terpadu dengan kegiatan pembangunan hutan tanaman industri, dan diharapkan kegiatan pembangunan tanaman dapat berhasil dan menjamin ketersediaan bahan baku secara berkesinambungan dan masyarakat dapat berkembang dan mampu membangun dirinya sendiri dengan potensi yang dimiliki yaitu Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.

Pengembangan masyarakat merupakan suatu proses, suatu usaha yang berkesinambungan. Proses itu sendiri menuntut adanya pentahapan sasaran yang merupakan prasyarat bagi tercapainya tujuan pengembangan masyarakat. Manager Distrik PT Sari Bumi Kusuma menyatakan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mewujudkan tugas humas berupa program pengembangan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan tersebut. Melakukan observasi bersama masyarakat setempat, bersama perusahaan mengadakan observasi untuk mengenali dan mengumpulkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan yang dimiliki atau kemampuan potensial yang ada dalam masyarakat. Menetapkan prioritas. Bila masyarakat sudah sadar akan masalah yang dihadapi, segera diajak untuk menetapkan prioritas. Dalam arti masalah mana yang akan ditangani terlebih dahulu. Menurut pendapat Manager Distrik PT Sari Bumi Kusuma ada beberapa Indikator yang dapat diamati bagi pelaksanaan tugas humas, diantaranya : Kemauan/kemampuan memahami kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya. (2) Kemampuan untuk memperhitungkan peluang, tantangan, masalah, dan resiko yang akan dihadapi. (3) Kemampuan untuk memilih berbagai alternatif yang ada untuk mengatasi masalah yang timbul dan mereka hadapi. (4) Kemampuan dalam penyelenggaraan kehidupan yang serasi dan secara berkelanjutan (Sumber: Hasil Wawancara, Maret 2013).

1.5. Tujuan Humas

Temuan dalam penelitian ini yaitu tujuan humas bagi penguatan hubungan kerja masyarakat dengan pihak perusahaan, agar terjamin adanya minat masyarakat bagi terpenuhi kebutuhan warga. Pemberian insentif infrastruktur merupakan salah satu upaya dari pihak perusahaan membantu masyarakat dalam rangka pembangunan sarana prasarana yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepentingan umum. Penyaluran dana diberikan setelah kegiatan persiapan dan atau pengolahan lahan selesai. Diberikan dalam bentuk fisik infrastruktur, pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, sedangkan pihak perusahaan hanya sebagai pendamping/fasilitator.

Dibuat berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani oleh pihak perusahaan dan pihak masyarakat.

2. Pola Hubungan Masyarakat

Penemuan penelitian pada bagian ini memfokuskan kepada dua pola hubungan dengan masyarakat yaitu pola hubungan internal dan pola hubungan publik eksternal.

2.1. Hubungan Internal

Menurut Manager Distrik PT Sari Bumi Kusuma hubungan dengan publik internal dilakukan dengan senantiasa mengadakan kontak pribadi (*personal contact*) dengan para karyawan. Kegiatan tersebut dilakukan guna membangun pengertian bersama, dan kepercayaan diri karyawan. Selain itu, bagian hubungan masyarakat pada PT Sari Bumi Kusuma senantiasa memperhatikan aspirasi yang berkembang pada para karyawan. Aspirasi yang berkembang pada para karyawan tersebut oleh bagian hubungan masyarakat selalu disalurkan kepada pimpinan (sumber: hasil wawancara, Maret 2013).

Dengan terpeliharanya hubungan yang harmonis, sehingga semua pihak merasa puas, bekerja dengan senang; dan organisasi tetap berjalan lancar yang pada gilirannya dapat mendukung pelaksanaan kebijakan hutan tanaman industri oleh perusahaan. Menurut koordinator hubungan masyarakat pada PT Sari Bumi Kusuma beberapa hal yang menjadi perhatian dalam melaksanakan hubungan dengan karyawan adalah, upah yang cukup, perlakuan yang adil, ketenangan bekerja, perasaan diakui, penghargaan atas hasil kerja serta penyaluran perasaan (sumbe Upah yang cukup untuk keperluan hidup adalah cita-cita semua karyawan. pada PT Sari Bumi Kusuma tidak pernah terjadi para pekerja yang menuntut kenaikan upah. Karyawan selalu diperlakukan secara adil di kalangan karyawan, tidak saja dalam hubungannya dengan upah, tetapi juga dengan soal-soal lain. Kalaupun ada karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil, sering kali disebabkan Informasi yang kurang jelas mengenai soal kepegawaian. Hanya dengan berkomunikasi dengan mereka, kesalah-fahaman akan dapat dihilangkan dan kepercayaan kepada pimpinan kembali dibina.

Semua Karyawan PT Sari Bumi Kusuma menginginkan bekerja dengan tenang, bukan saja dalam hubungannya dengan pekerjaan, tetapi juga dalam hubungannya dengan keluarga yang ditinggalkannya di rumah. Mereka tidak akan tekun bekerja, jika sebentar-sebentar teringat kepada istrinya atau anaknya yang sedang sakit. Mereka tidak akan tenang bekerja, bila selalu terancam bahaya putaran roda mesin atau terpeleset dari tempat yang tinggi. Mereka tidak akan serius kepada pekerjaannya apabila sering teringat akan nasibnya di hari tua. Menurut Manager Distrik PT Sari Bumi Kusuma (SBK) agar karyawan tetap giat bekerja, perusahaan menerapkan sistem jaminan antara lain jaminan jika mereka dengan keluarganya terjadi musibah, jaminan keamanan bekerja serta jaminan di hari tua (Sumber: hasil wawancara, Maret 2013).

Hubungan dengan publik internal pada PT Sari Bumi Kusuma juga dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan di luar tugas pekerjaan, seperti olahraga, kesenian, dan sebagainya. Para Karyawan PT Sari Bumi Kusuma menginginkan agar hasil karyanya dihargai, meskipun sebenarnya adalah kewajiban mereka untuk bekerja segiat-giatnya. Untuk itulah mereka diberi upah standar upah maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Meskipun demikian, akan selalu terpelihara adanya harmoni, bila diadakan acara-acara tertentu sebagai tanda bahwa hasil karya mereka dihargai. Ini bisa dalam bentuk penghargaan berupa bantuan uang, barang atau piagam (hasil wawancara, Maret 2013).

2.2. Pola Hubungan Eksternal

Aspek penting hasil penelitian yang diperhatikan dalam pelaksanaan hubungan masyarakat dengan PT Sari Bumi Kusuma di Merako Jaya Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang adalah efektivitasnya terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Efektivitas terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek seperti: interaksi sosial, mengurangi tingkat kesenjangan sosial, nilai sosial dan persepsi masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, mengenai hubungan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Oleh PT Sari Bumi Kusuma di Merako Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Pola hubungan masyarakat atau penduduk lokal dengan pihak perusahaan, baik dengan karyawan maupun para pendatang mengalami pasang dan surut.

Kondisi pola hubungan penduduk lokal dengan pihak perusahaan biasanya selalu terjaga dengan baik, hal ini ditandai oleh adanya kepedulian pihak perusahaan dengan lingkungannya. Seperti adanya hubungan yang selalu terbangun sejak di mulainya penanaman, hingga perusahaan tersebut telah menghasilkan. Tentu membawa keuntungan bagi pihak perusahaan dan pihak penduduk local di Kecamatan Serawai.

C. Faktor – Faktor Mempengaruhi Hubungan Masyarakat Dengan Pt Sari Bumi Kusuma

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu alat kelengkapan humas apabila SDM-nya meningkat adalah redaksi. Menurut Manager Distrik PT Sari Bumi Kusuma (SBK) seksi redaksi ini termasuk paling sibuk, karena bidangnya memang luas (sumber: hasil wawancara, Maret 2013). Seksi redaksi yang berkualitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan memonitor dalam penyelenggaraan penerbitan dan pemberitaan, penyaringan informasi dan pelayanan informasi serta komunikasi pada PT Sari Bumi Kusuma (SBK). Seksi redaksi bagian hubungan masyarakat PT Finantara belum dilengkapi oleh sub-seksi pidato. Oleh karena itu, belum dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal. Sedangkan Sub Seksi Penerbitan sudah ada.

Kegiatan yang dilakukan Sub Seksi Penerbitan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan penerbitan, misalnya majalah organisasi, buletin, poster, kalender, agenda, dan sebagainya. Sub Seksi Hubungan dengan mass media PT Sari Bumi Kusuma (SBK) mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan yang berkaitan dengan penyebaran informasi melalui media, pers, radio, tv, film, dan lain-lain.

2. Pengelolaan Target Hubungan Masyarakat

Dari hasil wawancara dengan Koordinator Hubungan Masyarakat pada PT Sari Bumi Kusuma (SBK), guna memberikan kontribusi kepada rencana strategis perusahaan petugas hubungan masyarakat, selalu menyampaikan fakta dan opini, baik yang beredar di dalam maupun di luar perusahaan. Selain itu, kegiatan yang dilakukan adalah selalu menelusuri dokumen resmi perusahaan dan mempelajari perubahan yang terjadi. Hanya saja, petugas hubungan masyarakat belum dapat melakukan analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities dan threats*) (Sumber: Hasil Wawancara, Maret 2013).

Kerangka model pembinaan masyarakat ditetapkan oleh PT Sari Bumi Kusuma (SBK) merupakan bagian dari suatu kerangka model kehutanan terpadu, sehingga prosesnya tidak dapat dipisahkan dengan proses perolehan Lahan yang telah diuraikan sebelumnya. Model pembinaan tersebut memuat beberapa program kegiatan utama yang

akan dilaksanakan oleh perusahaan dan menjadi kewajiban perusahaan setelah ditandatanganinya kesepakatan penggunaan lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Pola kegiatan tersebut bersifat fleksibel yakni bentuk dan jenis kegiatan pada setiap komponen dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi, dusun/kampung atau desa setempat.

3. Anggaran Untuk Hubungan Masyarakat

Menurut Manager Distrik PT Sari Bumi Kusuma program hubungan masyarakat telah didukung dengan anggaran yang cukup memadai. Anggaran pada bagian hubungan masyarakat PT Sari Bumi Kusuma telah tersedia pos untuk karyawan seperti gaji yang tidak hanya untuk petugas/pejabat hubungan masyarakat, tapi semua staf yang mendukung kegiatan hubungan masyarakat seperti: sekretaris, pelayan, akuntan, resepsionis dan kurir (Sumber: Hasil Wawancara, Maret 2013).

Anggaran pada bagian hubungan masyarakat PT Sari Bumi Kusuma telah tersedia pos untuk Pengeluaran kantor (pengeluaran tetap seperti uang sewa, biaya asuransi, pemanas, lampu dan kebersihan). Selain itu, anggaran pada bagian hubungan masyarakat PT Sari Bumi Kusuma telah tersedia pos untuk material seperti alat tulis menulis, perangko, biaya cetak, media visual, stand pameran, fotografi, film dokumenter, film *slide*, audio dan video kaset maupun pos untuk ongkos-ongkos pengeluaran uang saku, biaya perjalanan, biaya hotel dan rumah sakit, catering dan berbagai sewaan lainnya.

4. Opini Publik Dan Citra Perusahaan

Pada umumnya, fungsi hubungan masyarakat adalah: menjalin hubungan yang harmonis antara lembaga dengan masyarakatnya, baik “masyarakat dalam” (internal publik) maupun “external publik” (masyarakat luar; Menciptakan saling pengertian (mutual understanding) antara lembaga dengan masyarakat, demi terwujudnya “*public understanding*” (pengertian umum), “*public confidence*” (kepercayaan umum), “*public support*”, (bantuan umum) dan “*public cooperation*” (kerjasama umum); Membentuk pendapat umum yang “*favourable*” (menguntungkan) bagi PT Sari Bumi Kusuma

Untuk membentuk opini publik yang baik/positif bagian hubungan masyarakat tidak pernah melakukan tindakan yang bersifat memaksa seperti tindakan-tindakan berupa dengan teror, pemerasan, boikot, menerapkan kekuasaan dan cara-cara lain. Cara yang dilakukan adalah tindakan yang bersifat membujuk seperti komunikasi yang bersifat persuasif baik yang bersifat secara lisan: pidato, ceramah, *briefing*, propaganda, *lobbying* dan sebagainya maupun tertulis melalui gambar-gambar, isyarat, tanda-tanda dan sebagainya. Sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, bagian hubungan masyarakat PT Sari Bumi Kusuma telah berupaya mengidentifikasi citra seperti apa yang diinginkan masyarakat maupun karyawan. Menurut Manager Distrik PT Sari Bumi Kusuma bagian hubungan masyarakat PT Sari Bumi Kusuma telah melakukan penelitian untuk dapat mengetahui secara pasti sikap masyarakat terhadap PT Sari Bumi Kusuma, mengetahui apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh masyarakat di sekitar perusahaan (Sumber: Hasil Wawancara, Maret 2013).

Dari beberapa kajian tentang faktor-faktor hubungan penduduk lokal dengan pihak perusahaan tentu lebih banyak saling menguntungkan. Kedua belah pihak walaupun pernah terjadi hubungan yang tidak terutama ketika perusahaan kurang peduli dengan lingkungannya. Maka penduduk lokal mengadakan perlawanan bagi kepentingan mereka, sehingga terjadilah negosiasi yang saling menguntungkan bagi perbaikan hubungan sosial dari kedua belah pihak tersebut.

PENUTUP

Beberapa kajian dari beberapa bab terdahulu, maka perlu ditarik suatu kesimpulan bagi mempermudah untuk didiskusikan sebagai berikut: Strategi hubungan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan HPH oleh PT Sari Bumi Kusuma (PT SBK) di Merako Jaya Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang dilakukan baik melalui hubungan dengan publik internal (karyawan dan pemegang saham) maupun hubungan dengan publik eksternal (masyarakat sekitar). Dari aspek hubungan dengan publik eksternal (masyarakat), diketahui bahwa intensitas interaksi antara penduduk lokal dengan karyawan PT Sari Bumi Kusuma (PT SBK) cukup tinggi, terutama dalam kaitannya dengan aspek pekerjaan, aspek olah raga serta aspek agama. Sedangkan interaksi dalam kaitannya dengan aspek politik, kesenian dan etnis atau kesukuan tidak pernah atau jarang dilakukan. Kecenderungan yang sama nampak pula pada intensitas interaksi antara responden dengan pendatang tapi bukan karyawan PT Sari Bumi Kusuma.

Hasil penelitian memperlihatkan warga di lokasi penelitian mengalami kesukaran mendapatkan informasi mengenai pekerjaan di PT Sari Bumi Kusuma. Kesukaran-kesukaran tersebut terutama dialami pada bidang pekerjaan administrasi/perkantoran, produksi dalam pabrik dan operasi di luar pabrik. Sedangkan pada bidang pekerjaan kasar dan pekerjaan musiman relatif bisa diperoleh oleh mereka. Kehadiran PT Sari Bumi Kusuma ternyata tidak berpengaruh terhadap perubahan nilai-nilai sosial masyarakat sekitar. Pada tabel di atas mengenai keadaan upacara atau selamatan yang berkaitan dengan daur hidup (*life cycle*), sebagian besar responden menyatakan jenis-jenis upacara atau selamatan seperti kelahiran, perkawinan dan kematian tetap bertahan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hubungan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan HPH oleh PT Sari Bumi Kusuma adalah berkenaan dengan ketersediaan kelengkapan hubungan masyarakat, pengelolaan target hubungan masyarakat, anggaran untuk hubungan masyarakat serta opini publik dan citra perusahaan. Berdasarkan aspek pelaksanaan hubungan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan HPH oleh PT Sari Bumi Kusuma diharapkan perusahaan lebih meningkatkan hubungan dengan masyarakat sekitar melalui keikutsertaannya dalam penyelesaian permasalahan terutama yang menyangkut status lahan, batas areal atau hak kepemilikan lahan masyarakat.

Berdasarkan aspek faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hubungan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan HPH oleh PT Sari Bumi Kusuma diharapkan perusahaan memberikan sanksi disiplin yang tegas bagi karyawan yang melakukan pelanggaran yang dapat merusak dan meresahkan penduduk lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alqadrie, SI. 2002. *Mesianisme Dalam Masyarakat Dayak Di Kalimantan Barat*. Dalam Florus Paulus *et al* (eds) *Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi*. Jakarta: PT Grasindo
- Ali, Faried, dkk, 2012, *Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*, Bandung: Radika Aditama.
- Angi, EM dan Wiati, CB. 2001. *Praktek Pengelolaan Hutan Masyarakat Secara Tradisional di Kalimantan Timur*. *Majalah Kehutanan Indonesia* Edisi II September 2001. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Awang, S.A. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Azwar S. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, OU. 1981. *Human Relations dan Public Relation Dalam Management*. Bandung: Alumni.
- Faisal, S. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*. Malang: YA3.
- Jones, C. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, 2004. *Otonomi Daerah Dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Studi Tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Hphh 100 Hadi Kabupaten Sintang*. Tesis pada Program Pascasarjana UGM Yogyakarta. (Tidak diterbitkan)
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Pamulardi, B. 1999. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Proseding Pertemuan Reguler IV Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat . *Desentralisasi Setengah Hati*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Soehardjito. 2000. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Kehutanan Masyarakat.
- Soemirat, S dan Ardianto, E. 2002. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryabrata,S.2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tadjudin. 1999. *Model Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Alam Produksi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wibawa, S. 1992. *Studi Implementasi Kebijaksanaan*. Laporan Penelitian pada Jurusan Administrasi Negara. Fisipol UGM Yogyakarta.

Peraturan Perundang – Undangan:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (tidak diterbitkan)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (tidak diterbitkan)
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 750/Kpts-II/1996, tentang Luas Areal Pengusahaan Hutan Tanaman Industri oleh PT Finantara Intiga di Provinsi Kalimantan Barat. (tidak diterbitkan)
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Penguakuan Kawasan Hutan. (tidak diterbitkan)